

PENGARUH DANA PERIMBANGAN YANG DIMODERASI BELANJA LANGSUNG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**Anak Agung Imas Permata
I Made Jember**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Pembangunan manusia pada hakekatnya adalah proses memperluas pilihan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator tingkat kesejahteraan. Dilihat dari sisi dana perimbangan dan belanja langsung, tujuan pemberiannya adalah untuk peningkatan standar pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, dimana dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Belanja Langsung dalam memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel pemoderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Belanja Langsung bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat mengetahui seberapa besar peran belanja langsung dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Belanja Langsung, dan Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Human development is essentially the process of expanding human choices. Human Development Index is an indicator of the level of The Public Welfare. In terms of balancing funds and direct Purchasing, the purpose of administration is to increase service standards and make the public welfare become better, which can be seen from the human development index as an indicator of public welfare. Economic growth is important to maintain the welfare of the people, but the growth is not the end of the human development. The purpose this study was to determine the role of direct purchasing in moderating the influence of the balancing funds to public welfare at the regency / city in the province of Bali. This study uses secondary data sourced from Statistics Center Corporation which were analyzed using multiple regression analysis with moderating variable. The analysis result showed that the Balanced Fund positively and was significant on public welfare, direct purchasing influenced positively and was significant on Public Welfare, while direct purchasing was not a moderating variable that could determine how much a direct role in moderating the influence of balancing funds to the public welfare.

Keywords: Balancing Funds, Direct Purchasing, The Public Welfare

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal adalah wujud otonomi daerah yakni merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah (Dartanto dkk, .2000). Tanggung jawab yang diberikan kepada daerah tersebut menurut beberapa orang merupakan upaya pemecahan masalah perencanaan pusat yang membingungkan (Oates, 1993). Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya (Darumurti dkk.2003). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja pembangunan sektor publik yang lebih besar untuk tujuan ini.

Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah (Sidik dkk, 2002). Di era desentralisasi sekarang ini sudah seharusnya pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan public yang baik bagi masyarakat local (Pentury, 2011).

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001). Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah (www.ksap.org). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU.

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah, karena selain dari sisi pendapatan, pengeluaran daerah juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Dairse, 2009:42). Belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja langsung sebaiknya lebih tinggi daripada alokasi belanja tidak langsung, karena semakin besarnya pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut (Lin, 1994). Semakin tinggi pendapatan dari daerah, baik dari Dana perimbangan dan PAD akan mampu memenuhi keperluan masyarakat. Desentralisasi akan mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan apabila dipusatkan pada belanja langsung atau belanja public (Vasques, 2001). Belanja langsung juga harus dikontrol dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Fasoranti, 2012). Pada akhirnya pengeluaran pemerintah daerah merupakan instrument yang penting dalam mengontrol perekonomian daerah (Ollukayode, dalam Inwa, 2012).

Perbaikan prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila indeks pembangunan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf juga *Purchasing Power Parity index* (PPP) (Kintamani, 2008).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jembrana	72.02	72.37	72.69	73.18	73.62
2	Tabanan	73.73	74.25	74.57	75.24	75.55
3	Badung	74.12	74.33	75.02	75.35	75.69
4	Gianyar	72	72.27	72.73	73.43	74.49
5	Klungkung	69.66	70.23	70.54	71.02	71.76
6	Bangli	69.72	70.06	70.71	71.42	71.8
7	Karangasem	65.46	65.93	66.42	67.07	67.83
8	Buleleng	69.67	70.16	70.69	71.12	71.93
9	Denpasar	77.18	77.45	77.94	78.31	78.8
BALI		70.98	77.45	72.28	72.83	73.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, IPM Provinsi Bali menurut kabupaten/kota dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi yaitu dengan pencapaian IPM dari tahun 2008 sebesar 77.18 meningkat hingga sebesar 78.8 persen pada tahun 2012, sementara peringkat terendah ditempati oleh kabupaten Karangasem. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar berhasil meningkatkan mutu modal manusianya dengan baik dalam hal kesehatan, pendidikan maupun pendapatan masyarakat yang menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia, berbeda dengan kabupaten Karangasem sebagai kabupaten dengan perolehan IPM terendah. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan IPM antar kabupaten/kota tersebut akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Untuk mengetahui peran Belanja Langsung dalam memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan objek penelitian Dana Perimbangan, Belanja Langsung dan Kesejahteraan Masyarakat. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui observasi non partisipan

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi berganda tanpa variabel moderasi dan dengan variabel moderasi (MRA). Alat uji regresi linier berganda tanpa variabel moderasi dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Model regresi berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dalam penelitian juga digunakan teknik analisis data menggunakan regresi melalui ujini teraksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZZ + \beta_3 I ZX_1-ZZ I + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X1 : Dana Perimbangan

ZX1 : Dana Perimbangan yang *dstandardized*

Z : Belanja Langsung

ZZ : Belanja Langsung *dstandardized*

I ZX1-ZZ I : Interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara ZZ dengan ZX1

e : Error

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan apakah variabel belanja langsung (Zz) merupakan variabel pemoderasi atau bukan. Hal ini dapat dilihat dari apapun nilai β_2 (signifikan atau tidak, positif atau negatif), asalkan β_3 signifikan berarti belanja langsung (Zz) merupakan variabel moderating (Utama, 2009: 128). Setelah itu, untuk menentukan apakah variabel moderasi memperkuat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dalam persamaan ini, jika β_3 signifikan, selanjutnya dilacak apakah variabel belanja langsung (Zz) memperkuat atau memperlemah pengaruh X1 terhadap Y, yaitu:

- a) Jika β_2 positif, signifikan atau tidak dan β_3 positif signifikan, maka Zz sebagai variabel moderating yang memperkuat pengaruh ZX1 terhadap Y (pengaruh positifnya bertambah)
- b) Jika β_2 negatif, signifikan atau tidak dan β_3 negatif signifikan, maka Zz sebagai variabel moderating yang memperkuat pengaruh ZX1 terhadap Y (pengaruh negatifnya bertambah)
- c) Jika β_2 positif, signifikan atau tidak dan β_3 negatif signifikan, maka Zz sebagai variabel moderating yang memperlemah pengaruh ZX1 terhadap Y (pengaruh positifnya berkurang)
- d) Jika β_1 negatif, signifikan atau tidak dan β_3 positif signifikan, maka Zz sebagai variabel moderating yang memperlemah pengaruh ZX1 terhadap Y (pengaruh negatifnya berkurang)

Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresinya baik atau tidak (Ghozali, 2005:130). Uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain Uji Normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas

Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi untuk pengujian hipotesis diukur dari nilai statistik uji signifikansi parameter individual, nilai statistik F, dan nilai koefisien

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Variabel Dana Perimbangan

Tabel 2. Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	382.397	384.853	400.311	396.658	464.324
Tabanan	499.870	513.030	512.583	534.404	656.500
Badung	390.928	457.854	322.095	280.705	515.654
Gianyar	467.248	493.322	468.281	499.403	604.397
Klungkung	341.226	347.066	334.470	358.900	432.131
Bangli	326.355	342.429	345.929	372.313	459.413
Karangasem	430.385	438.520	457.801	478.284	578.456
Buleleng	596.205	592.138	623.176	660.585	793.541
Denpasar	458.398	522.496	499.195	491.014	655.349
BALI	576.550.871	636.608.487	649.257.693	705.288.133	908.371.147

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Pada tabel 2 di atas, Buleleng menjadi daerah yang mendapatkan transfer dari pusat terbesar yaitu Rp 596.205.473.000 pada tahun 2008 meningkat sampai angka Rp 793.541.644.000 sedangkan kabupaten Bangli menjadi kabupaten dengan Dana Perimbangan terkecil dimana Dana Perimbangan yang diterima kabupaten Bangli pada tahun 2008 hanya sebesar Rp 326.355.846.000.

Kondisi Variabel Belanja Langsung

Tabel 3. Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	176.48	182.086	149.064	188.703	269.885
Tabanan	187.101	194.020	217.695	243.298	337.372
Badung	690.257	660.079	415.849	513.018	1.065.550
Gianyar	236.310	261.843	218.283	287.856	308.587
Klungkung	148.533	176.742	117.639	133.814	192.161
Bangli	186.394	139.563	135.968	208.679	196.495
Karangasem	264.065	252.998	153.668	262.478	343.564
Buleleng	254.296	248.750	196.523	322.226	292.689
Denpasar	270.886	319.213	332.997	419.553	609.115
BALI	439.693.880	520.146.882	489.691.916	762.656.651	1.132.059

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dari tabel 3 Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki nilai minimum Rp 117.639.433.000. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Langsung Terendah di Provinsi Bali diperoleh dari kabupaten Klungkung tahun 2010. Sedangkan nilai maksimum belanja langsungnya sebesar Rp 1.065.550.455.000 diperoleh dari kabupaten Badung 2012.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

$$\begin{aligned}
 Y &= 68.912 + 2.716 X_1 + 7.777 X_2 \\
 \text{Beta} &= \quad \quad 0.093 \quad 0.431 \\
 \text{Sig} &= \quad \quad 0.510 \quad 0.004 \\
 \text{Adjusted } R^2 &= 0.173 \quad \quad F = 5.590
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual yang dapat dilihat bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dimana koefisien dana perimbangan bernilai 2.716 dengan tingkat signifikansi 0,510. Belanja langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien parameter sebesar 7.777 pada signifikansi 0.004. Hasil data secara statistik pada bahwa Standardized Coefisien Beta variabel dana perimbangan adalah 0,093 dan Standardized Coefisien Beta variabel belanja langsung adalah 0.431. Dari hasil analisis data tersebut maka dapat dilihat bahwa variabel yang nilai koefisien Beta-nya tertinggi adalah variabel belanja langsung dengan demikian bahwa belanja langsung merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih dipengaruhi oleh faktor belanja langsung.

Berdasarkan hasil Uji F didapat F hitung sebesar 5.590 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Maka dapat dikatakan bahwa dana perimbangan dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0.173 atau 17.3% berarti bahwa persentase sumbangan variabel independen yaitu dana perimbangan dan belanja langsung terhadap indeks pembangunan manusia sebesar nilai koefisien determinasi yang ada yaitu 17.3%. Sedangkan sisanya sebesar 82.7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Ini berarti bahwa hipotesis pertama ditolak, yaitu dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun hipotesis kedua yang diterima, karena setelah dilakukan analisis ternyata belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Variabel Pemoderasi

$$\begin{aligned}
 Y &= 68.768 + 3.032 ZX_1 + 8.268 ZZ - 1.047 I ZX_2 - ZZ I + e \\
 \text{Sig} &= \quad \quad 0.755 \quad 0.552 \quad 0.971 \\
 \text{Adjusted } R^2 &= 0.152 \quad \quad F = 3.638
 \end{aligned}$$

Unstandardized Coefficient menunjukkan bahwa variabel belanja langsung bukan merupakan variabel pemoderasi. Hal ini dapat dilihat dari koefisien β_2 yang bernilai 8.268 dan tidak signifikan pada 0.552, lebih besar dari $\alpha = 0.05$, sedangkan koefisien β_3 bernilai negatif yaitu -1.047 dan tidak signifikan pada 0.971, lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa belanja langsung bukan merupakan variabel moderasi.

Selain itu, kolom Unstandardized Coefficient menunjukkan bahwa secara individu dana perimbangan memberikan nilai koefisien 3.032 dengan signifikansi 0.755; variabel belanja

langsung memberikan nilai koefisien 8.268 dengan signifikansi 0.552; dan variabel moderasi yaitu selisih absolut dana perimbangan dan belanja langsung memberikan nilai koefisien -1.047 dengan signifikansi 0.971

Berdasarkan hasil Uji F, didapat F hitung sebesar 3.638 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020. Maka dapat dikatakan bahwa dana perimbangan, belanja langsung, selisih absolute dana perimbangan dan belanja langsung, secara serentak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Nilai Adjusted R² sebesar 0.152 atau 15.2% berarti bahwa 15.2% variasi indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel dana perimbangan, belanja langsung dan selisih absolut dana perimbangan dan belanja langsung. Sedangkan sisanya sebesar 84.8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Ini berarti bahwa hipotesis ketiga ditolak, yaitu bahwa variabel belanja langsung tidak dapat bertindak sebagai variabel pemoderasi yang dapat mengetahui seberapa besar peran belanja langsung dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas Data dengan Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan Pertama

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.84532643
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.070
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.641
Asymp. Sig. (2-tailed)		.805
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa pengaruh variabel dana perimbangan dan variabel belanja langsung terhadap variabel indeks pembangunan manusia berdistribusi normal karena nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,641 signifikan pada 0,805 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 5. Uji Normalitas Data dengan Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan Kedua

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.84528082
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.070
	Negative	-.097

Kolmogorov-Smirnov Z	.652
Asymp. Sig. (2-tailed)	.789
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Berdasarkan tabel 5 bahwa pengaruh variabel dana perimbangan terhadap variabel indeks pembangunan manusia dengan belanja langsung sebagai pemoderasi, data berdistribusi normal karena nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,652 signifikan pada 0,789 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas Persamaan Pertama

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	DP	.961	1.040
	BL (M)	.961	1.040

a. Dependent Variable: IPM

Collinearity Diagnostics ^a						
			Variance Proportions			
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	DP	BL (M)
1	1	2.791	1.000	0.006	0.006	0.029
	2	.184	3.898	0.042	0.041	0.971
	3	.025	10.463	0.952	0.953	0.000

a. Dependent Variable: IPM

Tabel 7. Uji Multikolinearitas Persamaan Kedua

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	ZDP	.964	1.038
	ZBL (M)	.679	1.473
	AbsZDP*ZBL	.667	1.499

a. Dependent Variable: IPM

Collinearity Diagnostics ^a							
			Variance Proportions				
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	DP	BL (M)	DP*BL
1	1	2.729	1.000	0.047	0.046	0.041	0.040
	2	.644	2.058	0.002	0.764	0.112	0.065
	3	.369	2.719	0.951	0.180	0.093	0.096
	4	.258	3.251	0.000	0.010	0.754	0.799

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7 dapat dilihat bahwa model penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas, di mana nilai tolerance lebih dari 10 % atau nilai VIF yang kurang dari 10, ini berarti tidak ada hubungan yang kuat antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Heterokedastisitas Persamaan Pertama

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-.033	1.201		-.028	.978
	DP	3.787	2.497	.228	1.517	.137
	BL (M)	1.441	1.542	.141	.935	.355

a. Dependent Variable: Absolut Residual

Tabel 9. Uji Heterokedastisitas Persamaan Kedua

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-.925	2.715		-.341	.735
	ZDP	5.736	5.883	.346	.975	.335
	ZBL (M)	4.366	8.410	.426	.519	.606
	AbsZDP*ZBL	-6.245	17.616	-.332	-.354	.725

Dependent Variable: Absolut Residual

Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9 dapat dilihat bahwa tingkat disignifikansi masing-masing variabel bebas semuanya signifikan diatas 0.05, oleh karena seluruh model dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, Belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan Belanja langsung bukan merupakan variabel pemoderasi terhadap hubungan antara dana perimbangan dengan kesejahteraan masyarakat

Saran

Diharapkan adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya sehingga mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja langsung diharapkan lebih tinggi daripada alokasi belanja tidak langsung. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah melalui kontribusi publik, baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu

memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Diharapkan hal ini nantinya dapat memberikan dampak bagi peningkatan pembangunan manusia terutama didalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan terhadap angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga diharapkan adanya peningkatan dana transfer tiap tahunnya dan juga diperlukan prioritas alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran. Perbaikan prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila indeks pembangunan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk .

REFERENSI

- Dartanto dan Brojonegoro. 2000. Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah. Analisa Model Eknomi Makro Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 4 No. 1.*
- Darumurti, K. D.U. Rauta dan D. D. Kameo. 2003. *Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fasoranti, Sakita, Laksmi. 2013. The Effect of Government Expenditure of Infrastructure on the Growth of Nigerian Economy., 1997-2009. *International Journal of Economic and Financial Issue*. Vol.2, No. 4, pp 513-518.
- Inwa, Naisiru. 2012. Governmenth Expenditure and economic Growth in Nigeria: Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*. Vol.2, No.3, 718-723.
- Kintamani, Ida. 2008. Analisis Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.072 tahun ke 14.*
- Kuncoro, Mudrajat, 2007, Metode Kuantitatif, *Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi.*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lin, Say. 2004. Government Expenditure and Economic Growth: *Journal Economic*. 26:83-94.
- Oates,Wallance E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*. Vol. 46, no.2, (June, 1993), pp. 237-43. Symposium on Fiscal Decentralization.
- Pentury, M.A. 2011. Flypaper Effect Anomaly of West Papua Capital Public Expenditure. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3 (3), pp: 289-297.
- Sidik, M., B. R. Mahi, R. Simanjuntak, dan B. Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Simanjuntak, Robert. 2001. Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference. LPEM-UI. Jakarta.